

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nagari merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat adat (tradisional) yang mempunyai kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahannya dan khusus berada di wilayah persebaran etnis minangkabau. Otonomi daerah nagari dilandasi dari sistem kebudayaan minangkabau yang berbeda bentuk adatnya dan sudah berlangsung secara turun temurun. Perbedaan tersebut berdasarkan kekhasan nagari sebagai “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).¹

Dewasa ini, nagari merupakan bentuk pembagian wilayah secara administratif yang berada di bawah kecamatan yang ada di Sumatera Barat, dan secara khusus disebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan/atau berdasarkan asal usul dari adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.² Apabila dibandingkan,

¹SutoroEko, *Menggantang Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari*, IRE Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20

²Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Nagari

nagari setara dengan desa yang berada di wilayah lain di Republik Indonesia.

Nagari merupakan daerah otonom yang awalnya berdiri sendiri serta telah terpelihara sistem penyelenggaraannya sebelum Indonesia merdeka. Pembentukan suatu nagari tidak berdasarkan dari pembagian wilayah yang luas, melainkan dari keharusan pengadaan lahan yang baru dimulai dari kesepakatan susunan organisasi nagari yang merupakan bentuk komprehensif dari (minimal) 4 suku yang telah tergabung dalam suatu bentuk kesatuan masyarakat yang telah mendiami suatu lahan baru, serta pengembangan dari proses kesatuan masyarakat dalam bentuk *taratak*, *dusun*, *koto* dan nagari, mulai dari Nagari Pariangan yang merupakan nagari tertua.³

Nagari adalah pemerintahan tradisional Minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, bersifat egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan genealogi, kesamaan teritorial dan kesamaan religious, serta mempunyai *self governing community* yang lebih mengarah ke kesatuan masyarakat hukum adat.⁴

Kapasitas *self governing community* ini dilihat dari beberapa hal, yang meliputi⁵: Unsur Teritorial, dimana nagari memiliki batas wilayah berupa tanah, yang membentuk batas dengan nagari sekitarnya, dan wilayah

³M. Amir Sutan, *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997, hlm. 45-48

⁴SutoroEko, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 45

⁵Nursyirwan Effendi, *Pemerintahan Nagari Dan Pemerintahan Adat*, (ed) Alfan Miko. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 32.

tersebut dilihat sebagai harta pusaka komunal (kebersamaan). Unsur Sosial, dimananagari menjalankan sendiri sruktur sosialnya berdasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal).Unsur Ekonomi,nagari memiliki sekumpulan harta (aset) yang harus disediakan sebagai sumber pendapatan bagi pembiayaan kelangsungan nagari.Pengelolaan aset nagari berupa harta kekayaan (*pusako*)nagari dan sumber pendapatan nagaripun dikelola secara bersama-sama, kelembagaan adat secara kolektif mengawasi dan mengatur sirkulasi sumberdaya (*resources*) secara transparan dan adil, demi keberlangsungan kehidupan masyarakat nagari sesuai dengan prinsip musyawarah dan demokrasi lokal yang bersandar pada kearifan adat istiadat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karakter nagari yang egaliter, moderat dan demokratis berdasarkan kesamaan genealogis dan religius menyebabkan nagari mencapai bentuk originalitasnya dalam bentuk pemerintahan asli dalam struktur sosiologis minangkabau. Hal tersebut sesuai dengan karakter demokrasi dan otonomi, sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat, sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁶

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan dalam nagari sesuai dengan falsafah Minangkabau yakni *Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin* dan *Bulek Aia dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik* yang diimplementasikan dalam bentuk keberadaan Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan Badan Musyawarah membentuk koridor otonomi daerah yang bersinergi.⁷

Masyarakat nagarisecara tradisional umumnya merupakan anggota atau warga dari salah satu suku (kaum) di sebuah *rumah gadang*. Mereka mempunyai hak bersuara dalam memilih pemimpin yang mereka inginkan sebagai perwakilan dari kelompok sosialnya, karena pada hakekatnya kekuasaan di nagari bersumber dari pilihan dan aspirasi masyarakatnya. Oleh sebab itu, secara formal kepemimpinan dan otoritas tertinggi di pemerintahan nagari berada di tangan masyarakatnya.

Dapat dikatakan bahwa karakteristik dari sistem otoritas tradisional nagari di minangkabau adalah demokrasi, setiap orang secara adat adalah sama suaranya, berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah. Semua masalah dirundingkan dalam permusyawaratan dan putusan diambil sebagai hasil musyawarah dan mufakat. Terkadang untuk mencapai “mufakat” diperlukan waktu yang panjang. Mufakat merupakan kebenaran yang telah dicari secara bersama dan kebenaran itulah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam masyarakat nagari tradisional.⁸ Salah satu kekhasan yang sangat menonjol

⁷Sjahmunir, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 28.

⁸Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa, IRE, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

dalam masyarakat Minangkabau adalah dalam membangun sebuah spirit dan prinsip demokrasi yang tertanam kuat termuat dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya.⁹ Hal tersebut menyebabkan nagari memiliki keunggulan tersendiri yang akan berpengaruh pada pembangunan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.¹⁰ Dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang merupakan peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*)¹¹, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan, memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan nagari dapat tercapai.

Pembangunan nagari dapat diwujudkan apabila adanya sinergi antara pemerintah nagari dengan masyarakat, karena dalam mewujudkan tujuan program pembangunan nagari dibutuhkan suatu pola manajerial dalam

⁹Alfitri. MS. Maju ke Nagari Masa Depan yang Lebih Demokratis, 2002 dalam Zenwen Pador, dkk, Kembali ke Nagari: Batuka Baruak Jo Cigak?. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27, dalam Tengku Rika Valerina, Roni Ekha Putera, Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah di Sumatera Barat, Andalas University Press, Padang, 2010, hlm. 34

¹⁰M.E Dimock. G.O. Dimock, L.W. Koenig, Pubic Administration, Rinehart&Company, New York, 1960, hlm 523 dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 222.

¹¹Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 23.

pengelolaan pembangunan. Pola manajerial dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah nagari untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan nagari.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh dari pemerintah nagari/desa sangatlah besar pada pelaksanaan program-program nagari, baik itu dari bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan lain-lain terhadap masyarakat. Peneliti menemukan penelitian yang dilakukan oleh Fandy V. Sagai dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan).¹²

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat frekuensi usaha pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan pemerintah dalam proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan aparat pemerintah desa mampu melaksanakan lebih baik dari sebelumnya.

¹²Fandy V. Sagai, Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi Di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan), *Jurnal Eksekutif*, Volume 1. No.7, 2016.

Pada awalnya pelaksanaan pembangunan di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga seperti pembangunan balai desa, jalan ke kebun, jalan desa belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa dirasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Peran kepala desa sangat berpengaruh. Pola kepemimpinan kepala desa yang persuasif telah mengubah pola pembangunan di Desa Pakuure III. Dari hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pembangunan di Desa Pakuure III sudah berhasil, walaupun masih ada yang harus dibenahi untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan di desa/nagari mempunyai peranan penting dalam kerangka pembangunan daerah. Dalam prosesnya diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara cepat, dan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Dari penelitian terdahulu, kesetaraan nagari dengan desa juga harus disepakati dengan adanya perbedaan mendasar antara nagari dan desa. Nagari adalah pemerintahan tradisional Minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, bersifat egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan genealogi, kesamaan teritorial

dan kesamaan religious, serta mempunyai *self governing community* yang lebih mengarah ke kesatuan masyarakat hukum adat.¹³

Sedangkan desa adalah suatu bentuk kesatuan masyarakat yang merupakan perpanjangan pemerintahan zaman kolonial demi mengendalikan daerah jajahan hingga ke pelosok. Desa dengan pemerintahan tradisional Jawa yang bercorak sentralistik terpusat dari atas, bersifat eksklusif yang tumbuh dari keratonan, hanya berimplikasi pada desentralisasi dari pusat, dan merupakan *local self-government* yang artinya otonomi desa hanya berdasarkan implikasi desentralisasi dari pemerintah pusat. Pemerintahan desa adalah konsep pemerintahan dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak akan bersandar pada ide dan prakarsa masyarakat (*bottom up*).¹⁴ Perbedaan yang mendasar ini menyebabkan nagari yang tidak bisa serta merta disamakan dengan ketentuan tentang desa sebagai kesatuan masyarakat.

Salah satu nagari percontohan di Sumatera Barat adalah Nagari Batubulek, merupakan salah satu dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2016 Kabupaten Tanah Datar terpilih menjadi kabupaten terbaik di wilayah barat dalam penilaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kategori Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR. Dalam penilaian tersebut,

¹³Sutoro Eko, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 45

¹⁴Amaliatulwalidain, Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 2 No. 1 Agustus 2016, ISSN PRINT: 2502-0900, hlm. 3.

Kabupaten Tanah Datar berhasil dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, dengan mengedepankan keterpaduan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Mulai dari tahap perencanaan, pemograman, pembiayaan, implementasi, operasi, dan pemeliharaan hingga monitoring evaluasi.¹⁵

Nagari Batubulek mempunyai visi yakni “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarya, Berbakti, Mandiri serta Berkeadilan yang Dilandasi Filosofi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”,¹⁶ mempunyai strategi yang mengacu kepada kerangka *Good Governance* dan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan potensi daerah demi pembangunan nagari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Evaluasi Bidang Perkembangan Desa dan Kelurahan

No	Evaluasi Bidang	Aspek
1.	Pemerintahan	1. Pemerintahan 2. Kinerja 3. Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat 4. Desa dan kelurahan berbasis teknologi/ <i>E-Government</i> 5. Pelestarian adat dan budaya
2.	Kewilayahan	1. Identitas 2. Batas 3. Inovasi

¹⁵<http://www.harianhaluan.com/> diakses pada 20 Februari 2018, pukul 16.41.

¹⁶RPJM Nagari Batubulek Periode 2012-2018

		4. Tanggap dan siaga bencana 5. Pengaturan investasi
3.	Kemasyarakatan	1. Partisipasi masyarakat 2. Lembaga kemasyarakatan 3. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga 4. Keamanan dan ketertiban 5. Pendidikan 6. Kesehatan 7. Ekonomi 8. Penanggulangan kemiskinan 9. Peningkatan kapasitas masyarakat

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1, Nagari Batubulek mendapat predikat Nagari Berprestasi 2016 memiliki keunggulan di bidang kemasyarakatan pada aspek partisipasi masyarakat, yaitu pada pembebasan lahan. Nagari Batubulek menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Barat di tingkat Nasional pada Tahun 2016 dan meraih juara III Regional I serta memperoleh penghargaan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penghargaan Nagari Berprestasi 2016

No	Penghargaan	Keterangan
1	Piagam	

2	Piala	
3	Fasilitas Pelatihan	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Lombok dan Palu
4	Dana	Dana sebesar Rp. 42.500.000,- digunakan untuk: a. Pembangunan fisik nagari b. Pelaksanaan kegiatan nagari

Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2017

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, S.H, M.Si, kepada Wali Nagari Batubulek, Drs. Imran Yasir, dalam acara Temu Karya Nasional di Jakarta, 15 Agustus 2016. Dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 2016, kategori Nagari Batubulek adalah desa berkembang dari 17.000an desa di Indonesia, Nagari Batubulek mendapat peringkat 149 dari 222 Desa Binaan di Indonesia.¹⁷

Nagari Batubulek memiliki keunggulan dibandingkan 74 Nagari lainnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan.¹⁸ Pembebasan lahan ini mengacu kepada pembangunan nagari yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber

¹⁷Hasil wawancara survei awal dengan Imran Yasir, Wali Nagari Batubulek, Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB.

¹⁸Ibid.

daya manusia secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan nagari. Dalam hal ini perlu adanya manajemen yang baik dari pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Batubulek.

Dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan di Nagari Batubulek, pemerintah nagari melalui program dan kegiatannya yang dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) yang merupakan penjabaran visi, misi, program, dan tolak ukur Wali Nagari yang akan dilaksanakan dalam periode masa jabatan Wali Nagari Batubulek.

Penyusunan RPJM Nagari Batubulek 2012-2018 memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan lima tahun, dan isu-isu strategis yang berkembang.

Berdasarkan RPJM Nagari Batubulek 2012-2018, arah kebijakan pembangunan di Nagari Batubulek adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tersedianya gedung kantor wali nagari yang representatif, mudah dijangkau, dan terletak di pertengahan wilayah nagari
2. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar barat guna meningkatkan produksi pertanian masyarakat

¹⁹RPJM Nagari Batubulek Tahun 2012-2018

3. Memantapkan pelaksanaan pemerintah nagari melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan nagari, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis pada teknologi
4. Pembangunan dan perbaikan irigasi serta rabat beton jalan nagari
5. Memantapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keimanan dan ketaqwaan, pengembangan olahraga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperbesar akses bagi warga masyarakat yang kurang mampu
6. Dukungan dana penunjang kegiatan pada PAUD, TK, SD, dan SLTP
7. Meningkatkan keimanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka memperkuat tatanan sosial dan budaya setempat
8. Memantapkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda.

Arah kebijakan pembangunan di Nagari Batubulek tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur, sarana dan prasarana nagari saja, tetapi juga pada pembangunan nonfisik berupa upaya untuk menumbuhkembangkan kualitas aparatur nagari dan masyarakat serta upaya untuk memperkuat tatanan sosial budaya setempat.

Dalam pembangunan nagari memerlukan pemimpin yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur paksaan.

Wali Nagari Batubulek telah melaksanakan tugas dan melakukan inovasi-inovasi sehingga permasalahan nagari yang sangat kompleks dapat diupayakan penyelesaiannya. Pada masa awal pemerintahan Wali Nagari Batubulek Drs. Imran Yasir tahun 2006 kondisi perekonomian masyarakat di Nagari Batubulek sulit berkembang khususnya dalam bidang pengembangan usaha menengah dan kecil. Berikut adalah perkembangan pembangunan di Nagari Batubulek:

Tabel 1.3 Perkembangan Pembangunan Nagari Batubulek

No	Sebelum	Sesudah
1	Jalan di Nagari Batubulek masih tanah dan jalan setapak	Jalan di Nagari Batubulek telah di rabat beton dan aspal sepanjang 67 km
2	Semangat gotong royong masyarakat masih rendah	Semangat gotong royong meningkat, dengan ditetapkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Gotong Royong Nagari.
3	Akses masyarakat masih sulit	Akses masyarakat mudah
4	Biaya transportasi angkutan umum, angkutan hasil panen, dan pupuk mahal, mencapai ±Rp. 20.000,00	Biaya transportasi lebih murah, ±Rp. 3.000
5	Masih banyak lahan tidur	Lahan lebih produktif, misalnya untuk kegiatan pertanian,

		dibebaskan untuk pembangunan, rumah penduduk, pasar, sarana kesehatan, dll
6	Pendapatan masyarakat rendah	Pendapatan masyarakat mulai meningkat
7	Harga tanah rendah, yaitu Rp.30.000/meter	Harga tanah meningkat, yaitu Rp. 75.000 – Rp. 100.000/meter
8	Waktu tempuh kendaraan di nagari lama, yaitu ±2 jam	Waktu tempuh kendaraan di nagari cepat, yaitu ±15 menit.

Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.3, banyak perubahan di Nagari Batubulek, mulai dari akses berupa jalan, jembatan, pendapatan masyarakat, penggunaan lahan, hingga partisipasi masyarakat. Dengan banyak perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat, Nagari Batubulek banyak mendapat prestasi-prestasi, diantaranya:

Tabel 1.4 Prestasi Nagari Batubulek

No	Prestasi
1	Juara I Gerakan PKK Tingkat Provinsi Tahun 2006
2	Juara I Lomba HKG KB-Kes PKK Tingkat Provinsi Tahun 2007
3	Juara I Lomba BKB Tahun 2009
4	Juara I Lomba Arsip Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
5	Juara III Lomba Kelompok Tani Tingkat Provinsi Tahun 2014
6	Juara II Lomba Administasi PKK dan Dasawisma Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
7	Juara I Lomba Nagari Breprestasi 2016 Tingkat Kabupaten Tanah Datar
8	Juara I Nagari Berprestasi 2016 Tingkat Sumatera Barat
9	Juara III Nagari Berprestasi 2016 Regional I berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

10	Wali Nagari Terbaik Tingkat Sumatera Barat 2016
----	---

Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2017

Dalam pembangunan di Nagari Batubulek melibatkan banyak lembaga, meliputi pemerintah nagari, lembaga unsur yang ada di nagari, dan masyarakat. Pertama, pemerintah nagari, meliputi wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala urusan nagari, dan kepala jorong. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah pemerintah nagari dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi kepada setiap perangkat nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari yang merupakan kunci sukses pelaksanaan kerja yang diberikan agar dapat diselesaikan sesuai target yang diharapkan.

Kedua, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN). BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. BPRN merupakan mitra nagari yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Wali Nagari Batubulek dalam memecahkan permasalahan di nagari selalu melibatkan lembaga BPRN dan KAN, karena merupakan prinsip pelaksanaan pemerintahan nagari yang menyelaraskan antara eksekutif (Wali Nagari), legislatif (BPRN), dan KAN sebagai lembaga pembuat kebijakan adat salingka nagari. Dengan melibatkan lembaga tersebut maka

permasalahan yang ada di masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat dan diselesaikan dengan baik.

Ketiga, Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga kerapatan dari *niniak mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako* dan penegakan peraturan adat. KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.

Keempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM merupakan lembaga yang ikut merencanakan dan mengawasi kegiatan pemerintahan nagari di bidang pembangunan fisik dan sarana prasarana. Integrasi yang baik antara Wali Nagari dan LPM maupun lembaga lain di nagari menjadikan pembangunan yang dilaksanakan menjadi baik dan diterima oleh segenap unsur masyarakat dengan hasil positif.

Masyarakat merupakan subjek dalam pembangunan nagari. Oleh karena itu, masyarakat harus berdaya, mandiri, dan memiliki pengetahuan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka salah satu yang menjadi kewenangan desa/nagari adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumberdaya,

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah nagari sesuai dengan kewenangannya di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:²⁰

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan
 - a. Pelatihan teknologi tepat guna
2. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - a. Penyuluhan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - b. Pelatihan khatib jumat
 - c. Pelatihan TPK
 - d. Pemberdayaan tenaga pendidik formal 5 TK
 - e. Pembinaan kelompok perempuan (PKK Nagari)
4. Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Perbaikan rumah keluarga miskin
 - b. Penyaluran beras keluarga miskin
5. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana

Ketika masyarakat telah diberdayakan melalui program pemberdayaan outputnya adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat

²⁰RKP Nagari Batubulek Tahun Anggaran 2017

merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah nagari. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.²¹ Keberhasilan dalam mencapai sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan pemerintah nagari, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi yang paling menonjol pada masyarakat Nagari Batubulek adalah pembebasan lahan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh masyarakat untuk nagari. Bentuk penggunaan lahan yang telah dibebaskannya yaitu berupa jalan dan sarana kesehatan masyarakat, berikut beberapa dokumentasi peneliti terkait dengan bentuk pembebasan lahan di Nagari Batubulek.

Gambar 1.1 Pembebasan Lahan Berupa Jalan di Nagari Batubulek



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2017

²¹ Rahardjo Adisasmita, op.cit., hlm. 25.

Berdasarkan gambar 1.1, lahan di Nagari Batubulek adalah pertanian tanah kering yaitu seluas 1.123,2 ha dari total lahan 3.510 ha. Untuk menjangkau dan mempermudah akses masyarakat dibutuhkan jalan, sehingga mempermudah transportasi, pengembangan, dan pemasaran dari hasil pertanian yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pelayanan masyarakat berjalan dengan lancar dan cepat. Lahan yang telah dibebaskan dibangun untuk jalan baru telah dibuka sepanjang ± 15 km, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Pembangunan Jalan di Nagari Batubulek

No	Jalan	Panjang Jalan
1	Kubendang sampai Puncak Pato	8 km
2	Lasuang Gadang	2 km
3	Gambir	4 km
4	Kebun Teleng	500 m

Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.5, salah satu arah kebijakan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Nagari Batubulek Tahun 2012-2018 telah tercapai, yaitu penyelesaian pembangunan jalan lingkaran barat dan pembangunan rabat beton jalan nagari.

Bentuk penggunaan lahan yang telah dibebaskan lainnya adalah berupa sarana kesehatan. Berikut dokumentasi peneliti terkait bentuk lain dari pembebasan lahan berupa Pos Kesehatan Nagari.

Gambar 1.2 Poskesridi Jorong Patar, Nagari Batubulek





Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2017

Dari gambar 1.2, bentuk pembebasan lahan lainnya di Nagari Batubulek adalah pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di beberapa jorong yaitu Jorong Patar, Kawai, Aur Duri, dan Pato. Sarana kesehatan menjadi hal penting karena menyangkut dengan kesehatan masyarakat. Dengan dibangunnya Poskesrimasyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dekat, permasalahan kesehatan di nagari dapat terdektesi dini, ditangani cepat, dan diselesaikan sesuai kondisi, potensi, dan kemampuan yang ada.

Kemudian perantau Nagari Batubulek yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Batubulek (IKBB) juga berkontribusi dalam pembangunan nagari. Perantau Nagari Batubulek tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Bentuk partisipasi perantau yaitu menyediakan *ambulance* untuk masyarakat nagari, aliran dana dari rantau ke kampung halaman, dan banyak pembangunan di nagari yang langsung dibantu oleh perantau.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan nagari. Yang dilakukan oleh pemerintah nagari adalah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan nagari adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah nagari mengajak dan memotivasi masyarakat

dengan cara yang persuasif. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Wali Nagari Batubulek, sebagai berikut:²²

“.....kami selaku pemerintah nagari dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap apapun itu bentuk pembangunan atau program nagari terlebih dahulu kami melihatkan contohnya kepada masyarakat. Dengan menjelaskan manfaat yang nantinya akan dapat kita rasakan. Kami selalu memotivasi masyarakat untuk selalu menerima perubahan dan hal baru dengan catatan memilah antara perubahan yang baik dan buruk. Alhamdulillah masyarakat lambat laun mengerti akan pentingnya kesadaran dan berpartisipasi dalam membangun nagari kita ini....”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah nagari menjadi *leader* dalam menyadarkan masyarakat dalam pembangunan. Karena pada dasarnya kesadaran masyarakat itu lahir dari masyarakat itu sendiri yang berasal dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan, dan peranan pemerintahnya. Dengan tingkat kesadaran masyarakat akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

Dalam manajemen pembangunan di Nagari Batubulek segenap sumberdaya dikerahkan oleh pemerintahan nagari. Dalam memobilisasi sumberdaya berupa uang, pemerintah nagari membuat anggaran dengan alokasi yang telah ditentukan pada musrenbang nagari yang dilakukan satu kali dalam setahun. Kemudian sumberdaya berupa manusia, pemerintah nagari menggerakkan masyarakatnya melalui program-program nagari yang ada dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

²²Hasil wawancara dengan Imran Yasir, Wali Nagari Batubulek, Kamis, 4 April 2018, pukul 10.00 WIB.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembangunan nagari dapat diwujudkan apabila adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan nagari membutuhkan manajemen yang baik dari pemerintah nagari agar pembangunan itu berjalan dengan lancar yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nagari/perdesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.²³ Pembangunan perdesaan mempunyai peran penting dalam kerangka pembangunan daerah. Dari perspektif manajemen pembangunan, yang berperan penting sebagai katalisator atau fasilitator dalam keseluruhan proses pembangunan adalah kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pemberdayaan (*empowerment*), membangun partisipasi (*participation*), menumbuhkan kesadaran (*awareness*), dan memobilisasi sumberdaya untuk pembangunan.²⁴

Terkait dengan hal tersebut, manajemen pembangunan perdesaan melibatkan banyak lembaga, antara lain pertama, pemerintah nagari, meliputi wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala urusan nagari, dan ketua jorong dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi kepada setiap perangkat nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari. Kedua, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN). BPRN adalah Lembaga

²³Robert Chambers, *Rural Development Putting the Last First*, John Willey and Sons Inc, New York, 1983 dalam Rakhmat, *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

²⁴Ibid., hlm. 55-56.

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Ketiga, Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga kerapatan dari *niniak mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako* dan penegakan peraturan adat. Keempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM merupakan lembaga yang ikut merencanakan dan mengawasi kegiatan pemerintahan nagari di bidang pembangunan fisik dan sarana prasarana.

Dalam pembangunan, masyarakat harus berdaya, mandiri, dan memiliki pengetahuan. Peran pemerintah nagari adalah melalui bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Ketika masyarakat telah diberdayakan melalui program pemberdayaan outputnya adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah nagari. Partisipasi masyarakat yang menonjol di Nagari Batubulek adalah dalam pembebasan lahan, dibuktikan dengan tidak adanya ganti rugi oleh pemerintah nagari kepada masyarakat atas lahan tersebut.

Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah nagari adalah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan nagari adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah nagari mengajak, memotivasi masyarakat dengan cara yang persuasif. Pemerintah nagari menjadi *leader* dalam menyadarkan masyarakat dalam pembangunan. Karena pada dasarnya kesadaran masyarakat itu lahir dari masyarakat itu sendiri yang berasal dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Dengan tingkat kesadaran masyarakat akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

Tersedia sumberdaya yang memadai harus dilestarikan dan dikembangkan. Memobilisasi sumber daya yang berarti adalah bagaimana memindahkan atau menggerakkan sumberdaya yang ada sehingga memiliki nilai potensi dan bermanfaat. Dalam manajemen pembangunan di Nagari Batubulek segenap sumberdaya dikerahkan oleh pemerintahan nagari. Dalam memobilisasi sumberdaya berupa uang, pemerintah nagari membuat anggaran dengan alokasi yang telah ditentukan pada musrenbang nagari yang dilakukan satu kali dalam setahun. Kemudian sumberdaya berupa manusia, pemerintah nagari menggerakkan masyarakatnya melalui program-program nagari yang ada dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari suatu proses manajemen. Manajemen pembangunan yang baik dapat

menghantarkan tujuan dan sasaran dari suatu program dengan optimal. Untuk mencapai tujuan dengan optimal melibatkan banyak unsur yang harus diatur dengan tepat sehingga pembangunan di Nagari Batubulek dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji manajemen pembangunan di Nagari Batubulek yang dirangkum dalam skripsi berjudul “Manajemen Pembangunan di Nagari Batubulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Pembangunan di Nagari Batubulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Pembangunan di Nagari Batubulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, yaitu

manajemen. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah nagari dalam memajemen pembangunan di Nagari Batubulek ataupun nagari lainnya.

